



ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2019-2020

Tiyas Drastiana^{1*}, Risdiana Himmati²

¹Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

²Dosen FEBI UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

*Corresponding Author Email: tiyasdrastiana@gmail.com



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Kinerja keuangan merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kerja dalam bidang keuangan atas pelbagai aktivitas yang telah dilakukan. Maka dari itu Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif melalui data sekunder dari laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat kemandirian pada Pemerintah Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng dari periode 2019-2020 masih dalam kategori rendah sekali. (2) Rasio efektifitas pada Pemerintah Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng periode 2019-2020 masih dalam kategori tidak efektif. (3) Tingkat efisiensi pada Pemerintah Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng periode 2019-2020 masuk dalam kategori sangat efisien. (4) tingkat pertumbuhan Pemerintah Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng tahun 2019-2020 cenderung fluktuatif.

Kata Kunci: rasio kemandirian; rasio efektifitas; rasio efisiensi; rasio pertumbuhan: kinerja keuangan.

Abstract: Financial performance is a level of achievement of the results of work in the financial sector for various activities that have been carried out. Therefore, the Regional Government must conduct a financial analysis using the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratio. The purpose of this study was to determine the financial performance of the

Provincial Government of East Java and Central Java Province. The analysis technique in this study is descriptive quantitative using secondary data, namely from the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) of East Java Province and Central Java Province in 2019-2020. The results of this study indicate that (1) The ratio of independence in the Provincial Government of East Java and Central Java Province from 2019-2020 is still in the very low category. (2) The effectiveness ratio in the Provincial Government of East Java and Central Java Province in 2019-2020 is still in the ineffective category. (3) The efficiency ratio in the Provincial Government of East Java and Central Java Province in 2019-2020 is in the very efficient category. (4) The growth ratio of the Provincial Governments of East Java and Central Java Province in 2019-2020 tends to fluctuate.

Keywords: *independence ratio; effectiveness ratio; efficiency ratio; growth ratio; financial performance.*

PENDAHULUAN

Antusias masyarakat dalam mengetahui pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah menjadikan sebuah tuntutan untuk dilaksanakan otonomi daerah. Menurut Halim (2012) otonomi daerah ialah hak suatu daerah masing-masing guna menjalankan serta mengelola kebutuhan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Otonomi daerah berlaku sejak tanggal 1 bulan Januari tahun 2001 di mana memberikan suatu modifikasi yang cukup relevan pada mengelola administrasi di Negara Indonesia. Menurut Bastian (2006) sasaran dari berlakunya otonomi daerah untuk mewujudkan suasana ketatanegaraan demokratis, melahirkan suatu strata yang merata serta adil, masing-masing daerah dapat mengeksplorasi potensi yang ada, serta kesiagaan dalam menghadapi globalisasi, dan menjaga NKRI.

Otonomi daerah memberikan dampak kinerja keuangan daerah di mana keseluruhan kegiatan Pemerintah Daerah yang memiliki perencanaan wajib dikerjakan secara jelas, efektif, serta ekonomis guna mendukung perekonomian daerah. Menurut Suhadak (2007) tata cara mengelola keuangan daerah adalah suatu hal yang dipersiapkan dengan matang oleh daerah masing-masing. Mengelola bidang keuangan daerah merupakan aktivitas yang mencakup suatu penerapan serta melaporkan tanggung jawab guna mengawasi finansial suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat dituangkan dalam suatu laporan APBD.

APBD ialah suatu laporan bidang keuangan Pemerintah daerah pada periode tertentu, di mana memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Retno dan Ruserlistyani (2013) APBD adalah suatu program utama Pemerintahan Daerah yang mendukung dalam mengupayakan menaikkan kemampuan Pememrintah Daerah.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan akuntabilitas dalam memanfaatkan penggunaan dana masyarakat secara transparan. Bentuk transparansi daerah pada anggota masyarakat ialah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah (Habib, 2021). Menurut Mardiasmo (2004) pelaporan keuangan daerah digunakan untuk memberikan transparansi serta acuan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, bahkan politik tanda pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah, hal lain sebagai bahan untuk pengevaluasian kinerja daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan menjadi elemen yang penting untuk terciptanya pengelolaan sistim yang baik dalam pemerintahan. Salah satu teknik yang seringkali dipakai menganalisa kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan pada APBD yang telah disahkan serta dipublikasikan dengan menghitung rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas, rasio efisisensi, dan rasio pertumbuhan.

Dari pemaparan diatas, penulis mengkaji sejauh mana kinerja Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Hasil dari analisa rasio pada keuangan daerah bias dijadikan pedoman guna mengembangkan pengelolaan kerja keuangan daerah dari period eke periode berikutnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti “Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengan Pada Tahun 2019-2020”.

KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan suatu pemerintahan yang menjalankan pemerintahannya dengan aturannya sendiri sesuai aspirasi rakyatnya. Berdasarkan Suparmoko (2002) otonomi daerah yaitu wewenang daerah otonom guna mengelola serta mengurus keperluan masyarakat dengan caranya sendiri beralaskan harapan masyarakat. Otonomi daerah memiliki tujuan utama yakni memperbaiki pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya ketentraman masyarakat. Hal lain yaitu memajukan perekonomian daerahnya dengan cara meciptakan efisiensi dan efektifitas sumber daya daerahnya. Selanjutnya mewujudkan wadah untuk masyarakat guna keterlibatan dalam pelaksanaan pengembangan daerah.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan yaitu pemberitahuan berita keuangan pada tahun tertentu yang menggambarkan suatu kinerja pengelolaan perusahaan atau kelembagaan. Menurut Baridwan

(2004) laporan keuangan dimaksudkan sebagai intisari dari proses pendataan yang memuat kesepakatan keuangan dalam suatu periode. Ikatan Akuntans Indonesia (2009) memaparkan misi dari dibuatnya laporan keuangan yakni guna memberitahu suatu berita atas keadaan keuangan, pengelolaan keuangan, serta perubahan pemungutan ketentuan ekonomi. Fahmi (2011) memaparkan misi yang paling penting atas laporan keuangan yaitu memberitahu informasi kondisi keuangan yang memperlihatkan transformasi dari bagian-bagian laporan pengelolaan keuangan atas kinerja keuangan suatu perusahaan.

Kinerja Keuangan

Halim (2004) menyatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan yaitu kemampuan daerah menjadikan salah satu tolak ukur yang digunakan guna memerhatikan kemampuan daerahnya ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Pramono (2014) penilaian kinerja keuangan merupakan suatu sistem yang dipakai guna menentukan nilai suatu objek. Nilai objek ini biasanya diakui atas suatu unit angka yang paten dengan menggunakan alat ukur yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2002) tujuan kinerja keuangan adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah agar berfokus pada tujuan yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Wahyuni (2) memaparkan APBD yaitu anggaran daerah yang mana adalah yang diterapkan pada bidang keuangan daerah. APBD ini diperkirakan guna membiayai kegiatan serta pembangunan proyek pada satu periode tertentu, serta suatu anggaran penerimaan dari sumber-sumber yang ada pada daerah untuk memenuhi biaya pengeluaran.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan menurut APBD dilaksanakan dengan cara menghitung kemudian membandingkan suatu hasil pada tahun ke tahun berikutnya guna mengetahui kondisi keuangan Pemerintah daerah. Menurut Samryn (324) analisis rasio pada keuangan yakni alat untuk analisis membandingkan data keuangan, hal ini digunakan guna dasar untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah. Menurut Abdul Halim (2004) analisis rasio pada keuangan ialah suatu usaha mencari tahu karakter pada keuangan daerah menurut laporan pengelolaan keuangan yang sudah ada. Berikut adalah rasio alat analisis keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri pengembangan serta melayani masyarakat di mana mereka sudah membayar kewajiban pajak serta retribusi sumber utama pendapatan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah. Bertambahnya tinggi tingkat atau kriteria rasio kemandirian keuangan artinya bahwa keterkaitan Pemerintah Daerah akan bantuan dari pusat semakin menuju rendah, begitupun sebaliknya. Menurut Halim (2012) perumusan guna menganalisa kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Tingkat dan kriteria kemandirian serta kemampuan ada keuangan pemerintahan daerah akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Rasio	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak efektif

(Halim, 2004)

2. Rasio Efektifitas

Halim (2012) Rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah menggambarkan ukuran Pemerintah Daerah guna merealisasikan PAD yang telah dianggarkan kemudian mengadakan perbandingan menggunakan target yang dipatenkan sesuai potensi riil Pemerintahan Daerah. Menurut Halim (2012) rasio efektifitas bisa dirumuskan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Nilai keefektifitasan keuangan daerah bisa digolongkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2

Nilai Rasio Efektifitas Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak efektif

(Mahamudi, 2016)

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menghasilkan perbandingan disela-sela banyaknya biaya yang dilepaskan dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Kemampuan kinerja pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan pemungutan pendapatan masuk kriteria efisien apabila rasio yang telah didapatkan tidak lebih 1 atau dibawah 100%. Artinya, semakin nilainya kecil tingkat rasio efisiensi maka kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin membaik. Menurut Dwijayanti dan Ruserlistyani (2013) rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Pengeluaran}{Realisasi\ Penerimaan} \times 100\%$$

Tingkat kriteria rasio efisiensi dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3

Nilai & Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Presentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

(Pramono, 2014)

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan memiliki manfaat guna mengetahui apakah Pemerintah Daerah pada periode anggaran, kinerja pengelolaan keuangan mengalami pengembangan pendapatan dan belanja dengan hasil positif atau negatif. Rasio pertumbuhan ini menakar seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan kesuksesannya yang telah digapai dari tahun ke tahun selanjutnya. Menurut Paat (2013) berikut adalah rumus rasio rasio pertumbuhan:

1. Rasio Pertumbuhan PAD

$$PAD = \frac{PAD \text{ tahun } t - PAD \text{ tahun } t - 1}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$Pendapatan = \frac{Pendapatan \text{ tahun } t - Pendapatan \text{ tahun } t - 1}{Pendapatan \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$Belanja = \frac{Belanja \text{ tahun } t - Belanja \text{ tahun } t - 1}{Belanja \text{ tahun } t - 1} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Tripitono Adi Prabowo (2013), yang memiliki tujuan untuk menganalisis kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim pada periode 2008 hingga 2013. Teknik analisa yang dipakai ialah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Provinsi Jatim telah masuk kategori lebih baik walaupun rasio aktifitas belanjanya membuktikan dominasi rasio belanja secara tidak langsung terhadap belanja secara langsung pengeluaran.

Marratus Sholikhah (2017), yang bertujuan guna mengetahui pengelolaan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintahan Kota Surabaya dengan memakai rasio keuangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis rasio lancer (*current ratio*). Hasil penelitian ini menyatakan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintahan Kota Surabaya sudah baik di periode tahun 2014-2016.

Novira Sartika (2019), yang memiliki tujuan guna mengetahui kinerja pengelolaan keuangan Kepulauan Meranti periode 2012 hingga periode 2016. Metode yang dipakai yakni deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan kinerja pengelolaan keuangan Kepulauan Meranti cukup efisien dalam pengelolaan keuangan karena mampu mengurangi jumlah untuk belanja daerahnya yang tidak mengalami kelebihan pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yaitu realisasi APBD daerah Provinsi Jatim dan daerah Provinsi Jateng periode 2019-2020.

Populasi, Sampling, Sampel

Penulis menggunakan populasi hasil laporan realisasi APBD daerah Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu satuan sampling yang dipakai berdasarkan pemeriksaan dengan misi guna memperoleh satuan sampling yang mempunyai karakteristik. Dengan kriteria sampling yaitu Pemerintah Daerah yang sudah memiliki website resmi dan aktif pada tahun 2019-2020, memiliki laporan keuangan yang didalamnya terdapat rincian sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti untuk menganalisis rasio keuangan Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng pada anggaran 2019-2020.

Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dari web resmi Kementerian Keuangan berbentuk laporan realisasi keuangan APBD pemerintah Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng.

Variabel Penelitian

Peneliti menggunakan dua variabel yang dipakai yakni variabel independent (X) atau variabel bebas ialah rasio keuangan dan variabel dependen (Y) atau variabel terikat adalah kinerja keuangan.

Skala Pengukuran

Peneliti menggunakan skala pengukuran pada penelitian ini ialah skala rasio, di mana memiliki sifat yaitu memberikan keterangan mengenai sebuah nilai dari obyek yang diukur. Skala ini menunjukkan hasil pengukuran yang bias dibedakan, diurutkan, dibandingkan, serta memiliki jarak tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan studi kepustakaan di mana peneliti memperoleh data dengan cara :

1. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan konsep yang diperoleh dari berbagai jurnal, internet, surat kabar, dan dokumen-dokumen yang berkaitan objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilah dan mempelajari penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi, tesis, dan sumber lainnya dengan fokus penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian ini diambil dengan cara memilah dan menjadikan satu data yang bersumber dari dokumen laporan yang tersedia. Bahan dari data analisa pada penelitian ini terdapat pada realisasi APBD pemerintah Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng anggaran 2019-2020.

Metode Analisis

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut :

1. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019-2020.
2. Analisis rasio keuangan yang digunakan berdasarkan data realisasi keuangan yang bersumber dari APBD pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2020, antara lain rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian

a. Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur adalah provinsi di Negara Indonesia dengan ibu kota Surabaya. Provinsi Jawa Timur berada diantara Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah, dibagian sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan dibagian sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hindia. Secara fisik kondisi geografis Provinsi Jawa Timur berada pada perbentangan antara 111° Bujur Timur sampai 114° Bujur Timur dan 712° Lintang Selatan sampai 848° Lintang Selatan. Topografi di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki banyak ragam anatar lain berupa perbukitan, pegunungan, dan kepulauan. Hal ini menyebabkan banyaknya sumber daya berupa pertambangan, pertanian, kehutanan, dan kelauatan. Provinsi Jatim terbagi menjadi dua puluh sembilan Kabupaten, sembilan Kota, enam ratus enam puluh enam Kecamatan, dan delapan ribu lima ratus satu Desa/Kelurahan.

b. Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jateng yaitu provinsi di Negara Indonesia dengan Ibu Kota Semarang. Secara astronomi terletak antara 5°40' - 8°30' lintang selatan dan 108°30'-111°30' bujur timur dengan memiliki luar wilayah sebesar 3.25 juta hektar (32.544,12 km²). Provinsi

Jawa Tengah jika dilihat dari sisi geografi nya yaitu pada bagian sebelah utara langsung berbatasan dengan Laut Jawa, untuk sebelah selatan langsung berbatasan dengan Provinsi D.I Yogyakarta serta Samudra Hindia, kemudian bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir bagian sebelah timur berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi Provinsi Jateng terbagi dalam dua puluh sembilan Kabupaten, enam Kota, lima ratus tujuh puluh tiga Kecamatan, tujuh ratus lima puluh Kelurahan, dan tujuh ribu delapan ratus sembilan Desa.

Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini:

$$a. \text{ Tahun 2019} = \frac{34.746,05}{45.194,73} \times 100\% = 0,76\%$$

$$b. \text{ Tahun 2020} = \frac{39.782,73}{17.281,73} \times 100\% = 2,30\%$$

Perhitungan menunjukkan rasio kemandirian keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 0,76%, sedangkan pada tahun 2020 rasio kemandirian keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah naik menjadi 2,30%. Kenaikan tingkat rasio kemandirian keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Timur diakibatkan karena jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan. Jumlah dana PAD yang di terima pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 34.746,05 yang kemudian ditahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 39.782,73. Penurunan tingkat rasio kemandirian keuangan tersebut diakibatkan karena pemerintah menerima dana transfer pada tahun 2019 yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah PAD nya, akan tetapi pada tahun 2020 dana transfer yang diterima oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan. Hal tersebut juga mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan pemerintahan Provinsi Jatim sangat rendah sekali.

Rasio kemandirian pemerintah Provinsi Jateng dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini :

$$c. \text{ Tahun 2019} = \frac{27,175}{71,136} \times 100\% = 0,38\%$$

$$d. \text{ Tahun 2020} = \frac{27,139}{61,429} \times 100\% = 0,44\%$$

Perhitungan diatas menghasilkan bahwa rasio kemandirian keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 adalah 0,38%, sedangkan pada tahun 2020 tingkat rasio kemandirian keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah turun menjadi 0,44%. Penurunan tingkat rasio kemandirian keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terjadi karena adanya penurunan jumlah PAD yang diperoleh pemerintah Provinsi Jateng di mana anggaran 2019 jumlah dana PAD yang diterima adalah sebesar 27.175 yang mengalami penurunan menjadi 27.139 pada tahun 2020. Penurunan penerimaan dana PAD tidak sebanding dengan penerimaan jumlah dana transfer yang diperoleh pemerintahan Provinsi Jateng yaitu pada anggaran 2019 menerima sebanyak 71.136 yang kemudian mengalami penurunan menjadi 61.429. hal ini menyebabkan terjadinya tingkat kemandirian yang sangat rendah sekali.

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini :

a. Tahun 2019 = $\frac{18.068,35}{6.616,38} \times 100\% = 2,73\%$

b. Tahun 2020 = $\frac{18.068,35}{10.890,22} \times 100\% = 75,27\%$

Perhitungan diatas menggambarkan tingkat rasio efektifitas keuangan pada Pemerintahan Provinsi Jatim pada anggaran 2019 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 tingkat efektifitas sebesar 2,73% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. Tahun 2020 pemerintah menaikkan target penerimaan PAD yang harus dicapai menjadi Rp 10.890,22 dengan presentase efektifitas sebesar 75,27% yang berarti masuk dalam kriteria kurang efektif.

Rasio efektifitas pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini:

a. Tahun 2019 = $\frac{28.047}{67.985} \times 100\% = 0,41\%$

b. Tahun 2020 = $\frac{27.811}{93.256} \times 100\% = 0,29\%$

Dari hasil perhitungan dapat dilihat tingkat efektifitas keuangan pada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 tingkat efektifitas sebesar 0,41% yang berarti masuk dalam kriteria tidak efektif. Tahun 2020 pemerintahan Provinsi Jawa Tengah menurunkan jumlah realisasi

menjadi Rp 27.811 dengan target mencapai Rp 93.256 kemudian tingkat efektifitasnya 0,29% yang berarti masuk dalam kriteria tidak efektif.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini :

- a. Tahun 2019 = $\frac{99.410.476,67}{11.557.911.797,63} \times 100\% = 0,008\%$
- b. Tahun 2020 = $\frac{17.281,75}{33.418,58} \times 100\% = 0,5\%$

Dari hasil perhitungan dapat dilihat tingkat efisiensi keuangan pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur dari anggaran 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 0,008% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efisien. Pada tahun 2020 pemerintah menurunkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan sebesar Rp 33.418,58 dengan presentase efisien sebesar 0,5% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efisien.

Rasio efisiensi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini :

- a. Tahun 2019 = $\frac{971}{7.916} \times 100\% = 0,01\%$
- b. Tahun 2020 = $\frac{639}{7.615} \times 100\% = 0,08\%$

Dari hasil perhitungan dapat dilihat tingkat efisiensi keuangan pada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 0,1% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efisien. Tahun 2020 pemerintah menurunkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan sebesar Rp 7.615 dengan presentase efisien sebesar 0,08% masuk dalam kriteria sangat efisien.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini:

a. Rasio Pertumbuhan PAD

1. Tahun 2019 = $\frac{34.746,05 - 34.746,05 - 1}{34.746,05 - 1} \times 100\% = 0,43\%$
2. Tahun 2020 = $\frac{39.782,73 - 39.782,05 - 1}{39.782,73 - 1} \times 100\% = 0,01\%$

Rasio pertumbuhan PAD menghasilkan arus pertumbuhan PAD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar -0,43% dengan Pendapatan Asli daerah pada saat itu sebesar Rp 34.746,05. Sedangkan ditahun 2020 tingkat rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pemerintahan Provinsi Jawa Timur mencapai -0,01% dengan Pendapatan Asli Daerah pada saat itu sebesar Rp 39.782,73.

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

1. Tahun 2019 = $\frac{63.732 - 63.732-1}{63.732-1} \times 100\% = 1,0\%$
2. Tahun 2020 = $\frac{139.279,50 - 139.279,50 - 1}{139.279,50-1} \times 100\% = 1,0\%$

Rasio pertumbuhan pendapatan pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai -1,0% dengan pendapatan sebesar Rp 63.732,96. Pada tahun 2020 rasio pertumbuhan pendapatan pemerintahan Provinsi Jawa timur berada pada angka yang sama yaitu -1,0% dengan pendapatan pada saat itu sebesar Rp 139.279,50.

c. Rasio Pertumbuhan Belanja

1. Tahun 2019 = $\frac{35.911,10 - 35.911,50-1}{35.911,50-1} \times 100\% = 1,0\%$
2. Tahun 2020 = $\frac{136.720,50 - 136.720,50 - 1}{136.720,50-1} \times 100\% = 1,0\%$

Rasio pertumbuhan belanja pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai -1,0% dengan total belanja sebesar Rp35.911,10. Pada tahun 2020 rasio pertumbuhan belanja pemerintahan Provinsi Jawa Timur berada pada angka yang sama yaitu -1,0% dengan total belanja pada saat itu mecapai Rp136.720,50.

Rasio pertumbuhan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan perhitungan dibawah ini :

a. Rasio Pertumbuhan PAD

1. Tahun 2019 = $\frac{27.714 - 27.714-1}{27.714 - 1} \times 100\% = 0,5\%$
2. Tahun 2020 = $\frac{27.139 - 27.139 - 1}{27.139 - 1} \times 100\% = 0,5\%$

Pertumbuhan PAD membuktikan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu -0,5% dengan Pendapatan Asli Daerah pada saat itu sebesar Rp27.715. sedangkan ditahun 2020 pertumbuhan PAD pemerintahan Provinsi Jateng sama hasilnya yaitu -0,5% dengan total Pedapatan Asli Daerah sebesar

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$1. \text{ Tahun 2019} = \frac{82.518 - 82.518 - 1}{82.518 - 1} \times 100\% = -1\%$$

$$2. \text{ Tahun 2020} = \frac{95.306 - 95.306 - 1}{95.306 - 1} \times 100\% = -1\%$$

Rasio pertumbuhan Pendapatan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mencapai -1% dengan pendapatan sebesar Rp82.518. Pada tahun 2020 rasio pertumbuhan pendapatan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berada pada angka yang sama yaitu -1% dengan pendapatan pada saat itu sebesar Rp 95.306.

c. Rasio Pertumbuhan Belanja

$$1. \text{ Tahun 2019} = \frac{40.531 - 40.531 - 1}{40.531 - 1} \times 100\% = -1\%$$

$$2. \text{ Tahun 2020} = \frac{93.265 - 93.265 - 1}{93.265 - 1} \times 100\% = -1\%$$

Rasio pertumbuhan belanja pemerintahan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 mencapai -1% dengan total belanja sebesar Rp40.531. Pada tahun 2020 rasio pertumbuhan belanja pemerintahan Provinsi Jawa Timur berada pada angka yang sama yaitu -1% dengan total belanja pada saat itu mencapai Rp93.265.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dihasilkan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kemandirian keuangan pada pemerintahan Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih dalam kategori rendah sekali.
2. Rasio efektifitas keuangan pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masih dalam kategori tidak efektif.
3. Rasio efisiensi keuangan pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 masuk dalam kategori sangat efisien.
4. Rasio pertumbuhan keuangan pada pemerintahan Provinsi Jatim dan Provinsi Jateng cenderung fluktuatif.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.

- Habib, M. A. F. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106-134. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>
- Halim dan Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba: Jakarta.
- Halim, Abdul dan Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat.: Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba empat: Jakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Paat, Selly. (2013). *Perbandingan Kinerja Pengelolaan APBD Antara Pemerintah Kota Termohin dengan Pemerintah Manado*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. Edisi September. 851-862.
- Pramono, J. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Among Makarti. 7(13):83-112.
- Suhadak, dan Trilaksono Nugroho. (2007). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Banyumedia Publising dan Lembaga Penerbit & Dokumentasi FIA: UNIBRA.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Wahyuni, N. (2012). *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI: Malang. 1-18.